

Aneksasi Rusia atas Krimea, Sanksi Uni Eropa, dan Penguatan Hubungan Strategis antara Rusia-Tiongkok

Ali Muhammad

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: alimuhammad@umy.ac.id

Muhammad F. Athifi

Departemen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: muh.f.athifi@gmail.com

Abstrak

Artikel ini berupaya mengamati dampak sanksi Uni Eropa terhadap Rusia setelah tindakan aneksasi Krimea pada tahun 2014. Uni Eropa dan Amerika Serikat mengutuk tindakan ilegal tersebut dan mencoba menekan Rusia untuk meninggalkan Krimea dan memenuhi semua tuntutan tanpa syarat. Sanksi tersebut termasuk larangan penyediaan teknologi untuk eksplorasi minyak dan gas, larangan pemberian kredit kepada perusahaan minyak Rusia dan bank-bank negara, serta pembatasan perjalanan terhadap warga Rusia berpengaruh yang dekat dengan Presiden Putin dan terlibat dalam pencaplokan Krimea. Apa konsekuensi sanksi Barat terhadap Hubungan Internasional Rusia? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan didukung oleh data sekunder dari buku, jurnal serta berbagai data valid dari internet, artikel ini menunjukkan bahwa sanksi tersebut sangat memukul perekonomian Rusia. Namun, artikel ini menunjukkan bahwa alih-alih melemahkan kekuatan Rusia, sanksi Barat justru memperkuat posisi strategis Rusia. Sanksi tersebut. Kondisi tersebut justru memperkuat hubungan ekonomi dan militer Rusia dengan Republik Rakyat Tiongkok. Rusia dan Tiongkok adalah kekuatan besar dalam politik dunia kontemporer. Penguatan hubungan strategis antara dua kekuatan besar tersebut memiliki dampak strategis terhadap politik dunia dewasa ini.

Kata kunci: Krimea, *great power*, Rusia, sanksi, Tiongkok

Abstract

This article examines the impact of the European Union's sanctions on Russia's international relations after the annexation of Crimea. The European Union and the United States condemned the illegal action and pressured Russia to leave Crimea and fulfill all demands unconditionally. The sanctions include a ban on providing technology for oil and gas exploration, a ban on granting credit to Russian oil companies and state banks, and travel restrictions on influential Russian citizens close to President Putin and involved in the annexation of Crimea. What are the consequences of Western sanctions on Russia's International Relations? The authors are using qualitative research methods, secondary data from books and refereed journals, and various valid data from the internet; this article shows that the sanctions hit the Russian economy hard. However, this article shows that the Western sanctions have strengthened Russia's strategic position instead of weakening Russia's power. It has strengthened Russia's economic and military relations with the People's Republic of China. Russia and China are great powers in contemporary world politics. The strengthening of the strategic relationship between the two great powers has a strategic impact on contemporary world politics.

Keywords: China, Crimea, great power, Russia, sanction

PENDAHULUAN

Pasca-aneksasi ilegal Rusia atas Krimea pada tahun 2014, Uni Eropa dan Amerika Serikat (AS) mengancam keras dan

mengumumkan penerapan sanksi atas Rusia. Pada bulan Maret 2014, Uni Eropa dan AS menekan agar Rusia mundur dari kawasan Krimea. Sanksi tersebut ditujukan

untuk mengubah kebijakan Rusia dengan cara mengisolasi, melemahkan ekonomi, mendiskreditkan presidennya, serta menciptakan citra Rusia sebagai negara "nakal" (Kazantzev, 2017). Seperti diketahui, pasca pecahnya krisis politik di Ukraina dan terjadi pergantian rezim di negara tersebut, Rusia secara sepihak melakukan aneksasi terhadap Krimea. Uni Eropa kemudian memprotes tindakan ini dan menerapkan sanksi keras terhadap Rusia. Sanksi yang dijatuhkan oleh Uni Eropa pada Maret 2014 adalah hasil dari kompromi di antara 28 negara anggota karena suatu kebutuhan moral sebagai tanggapan atas apa yang terjadi.

Terdapat tiga jenis sanksi yang dijatuhkan atas Rusia: larangan penyediaan teknologi untuk eksplorasi minyak dan gas, larangan pemberian kredit kepada perusahaan minyak Rusia dan bank negara, serta pembatasan perjalanan terhadap warga Rusia yang berpengaruh dan dekat dengan Presiden Putin serta terlibat dalam aneksasi Krimea. Namun, yang juga penting adalah sanksi yang melarang perusahaan Rusia mengakses teknologi penting Barat, terutama di sektor minyak dan gas, rekayasa roket, pengeboran, mesin berat, serta industri petrokimia. Sanksi semacam ini diharapkan bisa mengganggu rantai pasokan Rusia dan menghambat kapabilitas negara itu untuk membuat lompatan teknologi ke depan dan juga melemahkan kapasitasnya dalam modernisasi.

Permasalahan krusial yang akan dikupas dalam artikel sederhana ini adalah apa dampak sanksi Uni Eropa bagi hubungan internasional Rusia, khususnya bagi hubungan strategis Rusia dan Tiongkok? Pembahasan ini sangat penting mengingat Rusia dan Tiongkok merupakan *great power* yang perilakunya memiliki dampak strategis bagi konstelasi politik internasional dewasa ini.

Kerangka Konseptual

Sanksi merupakan instrumen yang bersifat diplomatik atau bersifat ekonomi

yang berupaya untuk mengubah sikap atau kebijakan suatu negara karena melakukan pelanggaran hukum internasional atau tidak menghormati aturan hukum atau prinsip demokrasi. Sanksi dapat berupa embargo senjata, pembatasan perdagangan khusus atau umum lainnya (larangan impor dan ekspor), pembatasan keuangan, pembatasan masuk (larangan visa atau perjalanan), atau tindakan lain. Tujuan dari sanksi adalah untuk menekan negara target agar mengubah kebijakannya. Sanksi ekonomi merupakan instrumen yang banyak digunakan dalam kebijakan internasional untuk memberi isyarat kepada negara target bahwa perilaku mereka melanggar norma internasional (Oxenstierna, 2019).

Studi tentang sanksi ekonomi yang dilakukan oleh Hufbauer, Schott, dan Elliott (1990) menunjukkan bahwa sanksi bisa berhasil sekitar sepertiga dari waktu sanksi digunakan. Namun, sebagian besar analisis sanksi ekonomi berpendapat bahwa sanksi jarang efektif dalam membawa perubahan kebijakan terhadap negara target. Dampak dari sanksi sangat bergantung pada institusi politik negara yang menjadi target.

Lektzian & Souva (2007) menunjukkan bahwa kecil kemungkinan sanksi bisa berhasil bila targetnya adalah negara yang non-demokratis daripada targetnya adalah demokratis. Agar berhasil, sanksi perlu menargetkan koalisi pemenang rezim. Sanksi ekonomi lebih mungkin akan menghasilkan perubahan kebijakan jika sanksi tersebut relatif luas dan memengaruhi banyak kelompok dalam masyarakat. Namun paradoksnya, ketika berhadapan dengan negara-negara non-demokratis, negara-negara harus menghindari sanksi-sanksi luas yang justru akan menyebabkan penderitaan bagi warganya. Padahal, warga tersebut bukanlah bagian dari koalisi pemimpin otoriter di negara tersebut. Beban ekonomi kemudian dikenakan terhadap masyarakat dan bukan terhadap rezim yang menjadi sasaran. Singkatnya, karena para pemimpin non-

demokratis pada umumnya memiliki koalisi yang didefinisikan secara sempit, sanksi yang luas justru akan cenderung kurang berhasil diterapkannya terhadap negara non-demokratis (daripada terhadap negara-negara demokratis).

Argumen tentang kapan sanksi bisa berhasil bisa diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: menekankan hukuman, menekankan pada pengungkapan kepentingan tertentu, dan menekankan pada institusi. Banyak penelitian empiris yang mengkaji efektivitas sanksi ekonomi telah dimotivasi oleh hipotesis sederhana, yakni, sanksi menyebabkan kerugian ekonomi sehingga negara sasaran kemudian akan mengubah kebijakannya. Dalam teori tentang sanksi tradisional, idenya adalah bahwa jika sanksi ekonomi bisa merugikan ekonomi negara yang jadi target, maka kerugian ekonomi tersebut bisa menyebabkan disintegrasi politik. Disintegrasi ini diakibatkan oleh keengganan penduduk di negara target untuk menderita secara ekonomi akibat dari kebijakan negaranya yang tidak populer di panggung internasional. Akibatnya, peningkatan tekanan ditempatkan pada pemerintah sasaran untuk memenuhi tuntutan sanksi. "Semakin banyak perampasan nilai, akan semakin banyak terjadi perpecahan politik" (Galtung, 1967: 388).

Secara khusus, kajian tentang sanksi Uni Eropa terhadap Rusia juga telah dilakukan oleh banyak peneliti. Bagheri & Akbarpour (2016), misalnya, mengkaji sanksi Barat atas Rusia. Dalam krisis ini, Amerika dan Uni Eropa telah mencoba mengubah perilaku Rusia dengan memberlakukan embargo komersial dan keuangan serta sanksi dalam jumlah besar terhadap individu. Di sisi lain, Rusia kemudian bereaksi dengan membalas sanksi Barat dengan menjatuhkan sanksi kepada para pejabat Uni Eropa dan Amerika Serikat. Bimbetova, et. al. (2019) juga mengkaji sanksi Barat atas Rusia. Mereka mengupas perdebatan tentang apakah sanksi internasional terhadap Rusia itu efektif atau tidak; secara khusus, apakah

sanksi dapat mengubah perilaku politik Rusia dan mencapai tujuan politik dalam krisis Ukraina. Mereka menguji dampak sanksi yang diterapkan oleh Uni Eropa dan AS terhadap rezim ekonomi nasional di Rusia. Ovcharenko, et. al. (2019) juga mengkaji sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia sehubungan dengan krisis Ukraina pada tahun 2014 dan sanksi balasan yang diberlakukan oleh Rusia. Mereka mengidentifikasi dampak sanksi dan sanksi balasan terhadap keamanan nasional Rusia. Sanksi ekonomi yang diterapkan oleh Barat terhadap Rusia juga dianalisis oleh Boucher (2020).

Dari berbagai kajian di atas, belum ada kajian yang secara khusus membahas tentang dampak sanksi terhadap hubungan internasional Rusia. Penulis melihat bahwa hal tersebut sangat penting mengingat Rusia bukanlah negara kecil yang mudah untuk dikendalikan. Sanksi Barat atas Rusia, seperti yang akan ditunjukkan dalam artikel sederhana ini, justru telah meningkatkan kekuatan Rusia karena justru telah memperkuat hubungan strategis dengan Tiongkok. Penguatan hubungan ekonomi dan militer antara kedua negara ini tentu bukan merupakan yang diharapkan oleh pihak Barat. Yang sangat penting adalah bahwa penguatan hubungan bilateral Rusia dan Tiongkok bisa mengubah konstelasi politik dunia dewasa ini.

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif untuk membedah fenomena yang dikaji. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan untuk menganalisis sebuah fenomena kausalitas (sebab-akibat) tanpa menggunakan sarana berpikir ilmiah yang bersifat numerik (Creswell, 2014: 232). Penghimpunan data dari penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa berbagai informasi valid terkait dengan sanksi Barat terhadap Rusia serta data-data yang terkait dengan peningkatan hubungan bilateral Rusia-Tiongkok. Data sekunder tersebut

dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel serta media daring. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan penulis yaitu deskriptif analitis untuk menjelaskan dampak dari sanksi Barat atas Rusia yang berupa peningkatan hubungan strategis antara dua kekuatan besar, yakni Rusia dan Tiongkok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Politik Ukraina

Krisis Ukraina bermula sejak November 2013. Saat itu, Presiden Ukraina Viktor Yanukovych membatalkan untuk membuat kesepakatan Kerjasama dagang dengan Uni Eropa. Yanukovych justru memutuskan untuk menerima pinjaman utang dari Rusia sebanyak \$15 miliar. Rusia memberikan utang tersebut sebagai bentuk kompensasi karena Ukraina batal melakukan kesepakatan dagang dengan Uni Eropa. Akibat dari batalnya kesepakatan tersebut, warga Ukraina wilayah barat tetap menginginkan agar Ukraina mendekatkan diri dengan Eropa Barat dan kelompok nasionalis menggelar demonstrasi (Curran, 2017).

Rusia berupaya melakukan pendekatan dengan Ukraina, karena Rusia memiliki rencana untuk membentuk pakta ekonomi saingan Uni Eropa. Ukraina merupakan negara terbesar di kelompok Eurasia; Ukraina juga membutuhkan pasokan gas dari Rusia. Oleh karena itu, sejak November 2013 Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengirimkan pasukan militer sebanyak 16.000 tentara ke Krimea. Rusia mengirimkan pasukannya ke Semenanjung Krimea karena wilayah ini didominasi oleh penduduk beretnis Rusia, yakni sebanyak 58,5% (Manurung, 2017). Pasukan militer ini kemudian menguasai semua pusat pemerintahan Ukraina dan gedung Parlemen sehingga membuat militer Ukraina tidak mampu bergerak sedikit pun.

Pada waktu itu, Ukraina berada dalam keadaan transisi politik dan masyarakat

yang terpecah, sebuah keadaan yang membingungkan baik bagi rakyat Ukraina baik yang pro-Barat, yang pro-Rusia, maupun yang netral. Rakyat Ukraina yang pro-Barat tentu mempercayai bahwa takdir Ukraina adalah dekat dengan pihak Barat dan untuk itu seharusnya Ukraina bergabung total dalam hal aliansi politik, ekonomi, dan militer dengan negara-negara Barat yang umumnya tergabung dalam Uni Eropa (UE), AS, dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Rakyat Ukraina yang pro-Rusia memiliki pandangan yang berbeda. Mereka memiliki pandangan bahwa Ukraina seharusnya dekat dengan Rusia karena ikatan agama, persaudaraan, dan historis. Sementara itu, ada pula rakyat yang ingin agar Ukraina memiliki hubungan baik dengan Barat dan dengan Rusia dalam keadaan yang sejajar dan saling menguntungkan.

Dalam kondisi krisis politik di Ukraina itu, Rusia justru melakukan aneksasi terhadap wilayah milik Ukraina, Krimea. Tindakan Rusia ini merupakan anakronisme dalam norma masyarakat internasional pada kondisi sekarang. Menurut pandangan Rusia, tindakan yang dipandang sebagai anti-sistemik tersebut adalah reaksi terhadap kekuatan-kekuatan pro-sistemik di bawah hegemoni AS. Tindakan tersebut juga merupakan reaksi terhadap korupsi, arogansi, dan penindasan yang dilakukan oleh Barat. Pihak Barat memandang bahwa Rusia kemudian harus diisolasi, diberikan sanksi, dikeluarkan dari kelompok G8 dan dianggap sebagai musuh bersama kekuatan-kekuatan pro-sistemik.

Setelah kerusuhan di Kiev pada Februari 2014 yang berujung pada penggulingan Presiden Yanukovych, masyarakat di bagian timur Ukraina merasa gelisah. Mereka khawatir bahwa pemerintahan yang baru akan menerapkan kebijakan nasionalis dan akan melarang penggunaan bahasa Rusia. Perlu dicatat bahwa mayoritas penduduk Ukraina bagain Timur sebenarnya berbicara dengan bahasa Rusia. Ditambag lagi, wilayah Donetsk yang

dikuasai oleh kelompok separatis juga menyimpan cadangan batu bara yang besar. Meski begitu, wilayah ini merupakan salah satu wilayah dengan perkembangan ekonomi paling lamban. Situasi inilah yang turut memicu referendum di Krimea pada 16 Maret 2014 yang berakhir dengan bergabungnya Krimea ke Rusia (Yegorov, 2017).

Krisis Ukraina sebenarnya didasari pada tarik-menarik kekuatan di dalam dan di luar Ukraina. Kekuatan di dalam adalah pihak pro terhadap Uni Eropa (etnis Ukraina, sekitar 77,8% populasi) dan yang pro-Rusia (etnis Rusia, 17,3% populasi). Sementara itu, pengaruh dari luar adalah akibat geografis Ukraina yang berbatasan dengan negara Uni Eropa di barat dan Rusia di Timur. Perebutan pengaruh antara EU/NATO vs. Rusia kemudian meruncing menjadi kerusuhan masal dengan korban puluhan jiwa. Dengan alasan melindungi masyarakat etnis Rusia, terutama di Krimea dan sebagian Ukraina Timur, Rusia mengirimkan pasukan ke wilayah Ukraina Timur—sebuah insiden yang kemudian dikenal dengan aneksasi atas Krimea.

Aneksasi Rusia atas Krimea

Aneksasi Rusia atas Krimea pada Februari dan Maret 2014, telah menimbulkan ketegangan baru antara Uni Eropa dengan Rusia sejak berakhirnya Perang Dingin (Muhammad, 2015). Invasi Rusia di wilayah Ukraina ini merupakan eskalasi taktik yang digunakan Kremlin selama dua dekade terakhir dalam mempertahankan *sphere of influence* di bekas wilayah Uni Soviet. Sejak 1990an, Rusia telah mendukung secara langsung maupun berkontribusi dalam pecahnya empat wilayah etnis di Eurasia, yaitu Transnistria, sebuah negara di Moldova yang mendeklarasikan kemerdekaan, yang terletak di antara Sungai Dniester dan Ukraina; Abkhazia, di pantai Laut Hitam Georgia; Ossetia Selatan, di utara Georgia; dan Nagorno-Kharabakh, wilayah pegunungan di barat daya Azerbaijan yang men-

deklarasikan kemerdekaannya di bawah perlindungan Armenia, menyusul terjadinya perang saudara yang brutal. Dalam kasus ini, Moskow telah menciptakan apa yang disebut dengan *frozen conflict*, dimana wilayah yang memisahkan diri berada di luar kontrol pemerintah pusat, sementara otoritas de facto lokal menikmati proteksi dan pengaruh Rusia (Mankoff, 2014).

Dalam kasus aneksasi Krimea, Rusia telah meninggalkan taktik lama dan semakin berani menghadaipi risiko. Keberanian Rusia bertindak jauh di Krimea, dibandingkan dengan kasus-kasus sebelumnya, didorong oleh faktor strategis Ukraina bagi Rusia dan keinginan kuat Presiden Putin untuk menunjukkan sikap tegasnya terhadap pihak Barat, yang dipandang bersikap hipokrit dan antagonis terhadap kepentingan Rusia.

Dukungan Moskow terhadap gerakan separatis Ukraina telah membuat negara-negara tetangga seperti Azerbaijan, Georgia, dan Moldova, menghentikan ketergantungan mereka terhadap Rusia dan memulai kerja sama dengan Barat. Kremlin menganggap aneksasi di Krimea sebagai serangan langsung terhadap Barat, termasuk juga Ukraina. Putin meyakini bahwa dirinya dan Rusia memperoleh hasil lebih dari konfrontasi dengan AS dan Eropa, yakni, konsolidasi posisi politik dan meningkatnya status internasional Moskow.

Di bawah Presiden Putin, Rusia berupaya keras untuk mengembangkan pengaruhnya dengan mendorong integrasi ekonomi dan politik dengan negara-negara bekas pecahan Soviet melalui pembentukan Uni Pabean dengan Belarusia dan Kazakhstan. Rusia juga berupaya membentuk Uni Eurasia—blok baru yang diluncurkan sejak tahun 2015 serta diklaim Putin akan mengikuti model Uni Eropa. Belarusia dan Kazakhstan telah menandatangani kesepakatan Uni Eurasia ini, sementara Armenia, Kyrgyzstan, dan Tajikistan telah juga menunjukkan ketertarikan mereka. Putin berupaya membangun blok Eurasia tersebut sebagi

blok alternatif kultural dan geopolitik. Putin juga menegaskan bahwa blok ini tidak akan berarti tanpa keikutsertaan Ukraina di dalamnya. Prospek perjanjian kerja sama antara Ukraina dan Uni Eropa pada November 2013 tentu mengawatirkan Rusia dan akan membuat Ukraina tidak masuk dalam Uni Eurasia tersebut. Untuk itu, Putin berupaya untuk memberikan konsesi kepada Yanukovich berupa jaminan pinjaman kepada Ukraina, dengan harapan agar Ukraina menolak iming-iming dari Uni Eropa.

Namun, perkembangan di Ukraina ternyata tidak sesuai dengan harapan Rusia. Tindakan Yanukovich yang menolak menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa justru telah mengakibatkan gelombang protes rakyat yang berujung penggulingan Yanukovich dari kursi presiden. Ditambah lagi, pada 21 Maret 2014 pemerintahan sementara Ukraina akhirnya menandatangani perjanjian dengan Uni Eropa. Ini tentu mengawatirkan Rusia. Dalam situasi seperti itu, Rusia kemudian menganeksasi Krimea. Salah satu alasan penting mengapa Moskow melakukan Tindakan itu adalah nilai strategis wilayah itu yang memiliki pangkalan Armada Rusia di Laut Hitam (Muhammad, 2016). Reaksi Uni Eropa kompak mengutuk tindakan itu dan diikuti dengan mengumumkan sanksi terhadap Rusia

Sanksi Ekonomi Uni Eropa terhadap Rusia

Hubungan antara pihak Rusia dan pihak Barat mencapai tahap krisis. Keduanya semakin berada di ambang Perang Dingin baru (Muhammad, 2016). Aneksasi Krimea merupakan salah satu alasan Barat untuk kemudian menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Mereka ingin memaksa Kremlin mengubah perilakunya terkait dengan konflik Ukraina dan memaksa untuk menarik mundur dari posisinya di Ukraina Timur. Uni Eropa memperpanjang sanksi ekonomi terhadap

Rusia sejak musim panas tahun 2014 sampai tanggal 31 Januari 2018 (Parstoday, 2017).

Sanksi ekonomi dikeluarkan oleh Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada pada tanggal 17 Maret 2014 melarang kunjungan beberapa elit politik Rusia dan membekukan aset-aset Rusia di luar negeri. Kemudian, Jepang menyusul dengan menunda pembicaraan mengenai militer, investasi, dan pembebasan visa antara kedua negara. Tekanan itu diharapkan bisa mendorong Rusia mengembalikan Krimea pada Ukraina. AS juga merilis daftar nama elit politik Rusia dan 17 perusahaan yang dikenai sanksi. Di antaranya adalah tokoh terkemuka di bidang perkapalan Arkady dan Boris Rotenberg, mantan pemilik Gunvor Oil Trading Company Gennady Timchenko, dan miliarder Yuri Kovalchuk. Bank Rossiya yang dimiliki oleh Kovalchuk juga terkena sanksi dari pemerintah AS. Imbasnya, Master Card dan Visa Internasional memblokir akses pemegang kartu Bank Rossiya ke jaringan mereka tanpa peringatan. Hal tersebut memberikan dampak berat yang dirasakan oleh perekonomian Rusia. Perusahaan-perusahaan Rusia, yang memegang dolar dan utang berdenominasi Euro, harus melunasi pinjaman mereka tanpa kemampuan untuk membiayai mereka kembali. Bank-bank Rusia yang ditargetkan oleh sanksi-sanksi Barat melihat aset luar negeri mereka membeku. Banyak perusahaan terpaksa menghentikan operasi dan mengurangi pekerjaan; beberapa bahkan membutuhkan suntikan modal pemerintah untuk bertahan hidup.

Sanksi keuangan dan kemunduran iklim investasi ini menyebabkan aliran modal keluar dan ekonomi Rusia menjadi melemah. Sanksi ekonomi terhadap Rusia memang telah memicu derasnya aliran modal yang keluar dari negara tersebut. Pada akhir 2014, menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat, aliran keluar mencapai \$70-80 miliar. Selama kuartal pertama 2014, sektor swasta telah menarik

keluar \$50,6 miliar dari Rusia, padahal di tahun 2013 sektor swasta hanya menarik \$27,5 miliar (Yegorov, 2017). Kemudian, pada periode Januari-Maret 2015 para investor memindahkan saham mereka ke luar negeri dalam nilai yang sangat besar, yaitu \$60 miliar (Yueh, 2015).

Waktu itu, sanksi ekonomi Barat juga bertepatan dengan penurunan tajam harga minyak dunia. Hal tersebut semakin memperburuk kondisi ekonomi Rusia, karena sebagian besar ekonomi negara bergantung pada produksi komoditas, terutama minyak. Harga minyak anjlok dari lebih dari \$100 per barel menjadi di bawah \$35 per barel pada akhir 2015. Seperti yang dilansir oleh *Thomson Reuters; Economist Intelligence Unit*, setelah harga minyak ambruk pada akhir 2014, ekonomi Rusia jatuh ke dalam krisis. Sebuah krisis kredit membuat pemerintah menggunakan cadangan untuk menyelamatkan bank dan perusahaan. *Foreign direct investment* Rusia turun dari \$69 miliar di tahun 2013 menjadi hanya \$6,8 miliar pada tahun 2015 (The Economist, 2017).

Uni Eropa juga meneruskan kebijakan keras terhadap Rusia yang sejalan dengan pendekatan umum Barat terhadap Rusia. Menurut Uni Eropa, sanksi ini diperpanjang karena Rusia tidak secara penuh melaksanakan kesepakatan Minsk 2015 dengan tujuan mengakhiri konflik di Ukraina. Sanksi ekonomi Uni Eropa menargetkan bank, perusahaan minyak, dan sektor pertahanan Rusia. Berdasarkan sanksi yang telah diterapkan, juga oleh Amerika Serikat, perusahaan Eropa dilarang melakukan bisnis dan atau menanamkan modal pada industri pertahanan dan energi Rusia. Hubungan dalam bidang keuangan juga sangat dibatasi. Perusahaan Eropa dilarang meminjam dari atau meminjamkan uang kepada lima bank utama milik pemerintah Rusia selama lebih dari 30 hari, dalam upaya membatasi kesempatan bagi Rusia untuk mengumpulkan dana. Selain larangan berbisnis dengan perusahaan-perusahaan

besar Rusia di bidang energi, ekspor peralatan terkait energi dan teknologi ke Rusia juga harus mendapat persetujuan oleh pemerintah negara-negara Uni Eropa (Parstoday.com, 2016)

Adanya sanksi tersebut menyebabkan stabilisasi harga komoditas tidak dapat menyelamatkan ekonomi Rusia. Dengan sanksi ekonomi yang menggelapkan prospek negara, nilai rubel Rusia dipotong menjadi dua sehingga bank sentral Rusia susah payah berusaha mempertahankannya, sampai dengan menghabiskan cadangan devisa sebesar \$200 miliar dalam usaha tersebut. Kemudian, dengan kekurangan barang impor dan lebih banyak rubel yang beredar, inflasi menjadi ancaman nyata; harga makanan naik drastis dengan daya beli orang Rusia biasa. Bank sentral Rusia lalu menaikkan suku bunga hingga 17% pada Desember 2014. Di tengah-tengah resesi ekonomi, dengan turunnya pendapatan dari produksi minyak Rusia, lonjakan pengeluaran mendorong anggaran pemerintah Rusia jauh ke dalam batas merah dan memicu potensi krisis ekonomi. Ketika dibutuhkan lebih banyak dana, Moskow menaikkan pajak dan menguras sepertiga dari asetnya sebelum harga minyak mulai stabil (The Economist, 2017).

Secara umum, sanksi AS dan Uni Eropa juga menargetkan industri pertahanan, intelijen, pertambangan, perkapalan, dan perkeretaapian serta membatasi kerja sama dengan bank dan perusahaan energi Rusia. AS juga menyatakan tetap menentang keras proyek gas Nord Stream 2 dan membatasi kemampuan presiden untuk meringankan sanksi terhadap Rusia karena dibutuhkan persetujuan kongres untuk mencabut sanksi apapun (Yegorov, 2017). Sanksi tersebut tidak menyebabkan Presiden Putin mundur, tetapi memang membuat keadaan Rusia menjadi lebih sulit. Rusia membalas sanksi Barat tersebut dengan menetapkan larangan impor daging, unggas, ikan, keju, buah, sayuran dan produk susu dari

Australia, Kanada, Uni Eropa, AS dan Norwegia. Selain itu, kehadiran sanksi Barat membuat pemerintah Rusia berinisiatif membangun sistem keuangan yang independen. Secara khusus, Rusia memiliki rencana meluncurkan sistem pembayaran nasional dan lembaga pemeringkat sendiri, termasuk di dalamnya mempertimbangkan berbagai opsi untuk bekerja sama dengan perusahaan Tionghoa.

Sanksi Militer Uni Eropa terhadap Rusia

Tidak hanya sanksi ekonomi. Barat juga menerapkan sanksi militer terhadap Rusia. Uni Eropa melarang negara-negara anggotanya menyuplai senjata dan perangkat keras militer untuk Rusia. Inggris dan Jerman menghentikan kerja sama militer dengan Rusia. Namun, sebenarnya sanksi Uni Eropa dalam kerja sama teknis-militer merupakan salah satu mata rantai terlemah dalam “perang” melawan Rusia. Ekspor persenjataan Eropa berjumlah tidak lebih dari satu persen dari jumlah total kontrak ekspor-impor Rosoboronexport—perusahaan yang menjadi perantara Rusia dalam kerja sama persenjataan.

Selain itu, Rusia sebenarnya adalah pemasok senjata dan peralatan militer yang terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Perusahaan industri pertahanan Rusia memiliki siklus produksi lengkap dari elemen dasar sampai produk akhir. Dengan demikian, sanksi Uni Eropa dalam kerja sama teknis-militer sebenarnya tak akan berdampak serius terhadap kemampuan pertahanan Rusia. Meski demikian, tak dapat dipungkiri bahwa ada kerugian justru dari pihak yang memberlakukan sanksi tersebut. London kehilangan \$133 juta dari pembatalan kerja sama penyediaan bahan untuk seragam militer Rusia. Jerman yang memasok senjata penembak jitu dan terlibat dalam pembangunan pusat pelatihan tempur digital di Mulino, Nizhny Novgorod, harus rela kehilangan \$100 juta.

Sementara itu, Prancis yang merupakan mitra militer terbesar Rusia awalnya masih bersikap *wait and see*.

Kontrak antara Rusia dan Prancis bernilai sangat tinggi. Penyediaan dua pengangkut helikopter kelas Mistral oleh perusahaan Prancis DCNS dan STX bernilai €1,2 miliar dan setengah dari jumlah tersebut telah dibayar oleh Moskow. Prancis juga berencana membangun dua unit kapal tambahan di Rusia. Selain itu, Paris dan Moskow terlibat dalam tiga kontrak besar untuk pasokan kendaraan lapis baja serta pesawat tempur Su-30MKI dan MiG-29K ke India yang bernilai jutaan euro. Namun, Prancis kemudian juga ikut menekan Rusia.

Konsekuensi Sanksi Barat Atas Rusia

Problem selanjutnya adalah, apakah dampak sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, dan khususnya terhadap hubungan Rusia-Tiongkok? Charap, Drennan & Noël (2017: 24) memberi catatan awal yang menarik:

“The Ukraine crisis and the downturn in Russia–West relations that came in its wake has compelled Russia to turn decisively towards China. Deprived of other options, Moscow has found itself in the position of demandeur vis-à-vis Beijing, creating an increasingly imbalanced bilateral relationship. Nonetheless, Russia and China have avoided any turbulence that might have resulted from this asymmetry through mutual accommodation and compromise.”

Yang jelas, aneksasi ilegal Rusia terhadap Krimea tersebut telah menyebabkan krisis hubungannya Rusia dengan Barat. Barat berupaya menghukum Rusia agar merubah kebijakannya. Namun, tujuan ini tidak berhasil. Tekanan Barat terhadap Rusia ini ternyata justru membuat Rusia untuk semakin dekat dengan Tiongkok. Walaupun hubungan antara Rusia dengan Tiongkok bukan tanpa masalah, hal tersebut berusaha dihindari demi memberi akomodasi dan kompromi antara kedua *great power* ini.

Konsekuensi: Peningkatan Hubungan Ekonomi Rusia-Tiongkok

Sanksi yang dijatuhkan Barat atas Rusia menyebabkan hubungan Rusia-Tiongkok kian menguat. Menariknya, masing-masing negara sebenarnya memiliki permasalahan. Moskow tengah menjadi sorotan dan dikritik oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat setelah menganeksasi Krimea dan diduga terlibat dalam konflik militer di timur Ukraina. Sementara itu, Beijing tengah menghadapi konflik sengketa wilayah di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan beberapa negara Asia Tenggara (Viva, 2014).

Rusia dan Tiongkok semakin saling membutuhkan jika dilihat dari aspek demografis, populasi dan kepentingan politik. Hubungan antara Kremlin dan Beijing makin mesra dalam satu dasawarsa terakhir di tengah dominasi Amerika Serikat dalam stabilitas keamanan internasional. Selain saling berbagi tapal batas wilayah, keduanya juga kerap satu kata di Dewan Keamanan PBB dan tidak jarang bergantian mengirimkan senjata keperluan militer. Persahabatan keduanya benar-benar diuji saat Barat memberlakukan embargo ekonomi penuh terhadap Rusia (Klein & Wsetphal, 2014).

Pemerintah Vladimir Putin sudah sejak lama ingin menjual lebih banyak produk minyaknya ke Tiongkok, ditandai dengan negosiasi panjang antara perusahaan BUMN kedua negara, yakni Gazprom dan Tiongkok National Petroleum. Sampai sekarang, kata mufakat untuk kerja sama energi monumental memang belum terwujud karena alasan harga. Namun di tengah tensi politik terkini, kemungkinan besar Rusia mau menurunkan bandrol harga produk energinya sehingga perjanjian kerja sama bisa langsung ditandatangani. Dalam hal ini, Tiongkok memiliki posisi tawar yang bagus. Selain serangkaian kerja sama ekonomi, Tiongkok juga merencanakan investasi langsung pada sektor gas di Rusia utara. Perundingan

untuk itu sudah berjalan lebih dari sepuluh tahun.

Pada tahun 2014, Putin berkunjung ke Tiongkok dan menandatangani sekitar 40 perjanjian ekonomi dengan Presiden Xi Jinping, termasuk kerja sama energi senilai \$400 miliar selama 30 tahun, mulai tahun 2018 (Deutsche Welle, 2014). Kedua negara juga setuju untuk menggunakan mata uang rubel dan yuan dalam transaksi perdagangan mereka. Dengan cara itu, Moskow dan Beijing akan mengesampingkan penggunaan dolar Amerika Serikat. Langkah ini diharapkan akan memperlemah dominasi dolar sebagai alat tukar yang diakui dunia internasional.

Rusia yang sedang berseteru dengan Barat terkait krisis Ukraina justru memperoleh keuntungan finansial dan ekonomi terutama di bidang energi melalui kesepakatan dengan Tiongkok. Rusia tampaknya kian memalingkan wajahnya dari Barat dan sekarang menatap ke arah Timur, khususnya Tiongkok. Munculnya perubahan prinsipil dalam hubungannya dengan Barat telah mendorong Rusia untuk mengadopsi pendekatan baru. Pendekatan ini mengindikasikan penafsiran baru tentang kepentingan nasional Rusia dalam berhubungan dengan Timur dan kekuatan-kekuatan ekonomi baru dalam kelompok BRICS (Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan). Dengan kata lain, bersama Tiongkok Rusia sekarang mengincar banyak tujuan kolektif dalam kebijakan internasional. Oleh karena itu, para pemimpin kedua negara menekankan partisipasi strategis antara Moskow dan Beijing serta upaya untuk memperkuat sistem multipolar dunia. Singkat kata, hubungan Rusia dan Tiongkok selama beberapa tahun terakhir mengalami banyak kemajuan dan kedua negara menjalin kerja sama bilateral dan multilateral yang luas, termasuk dengan memanfaatkan forum-forum internasional (Global Times, 2021).

Pada tahun 2015, pejabat pertahanan Rusia tampaknya lebih setuju untuk menjual senjata canggihnya kepada

Tiongkok, yang tampaknya mengindikasikan pergeseran besar pemikiran Rusia mengenai penjualan senjata. Menurut Alexander Gabuev, Moskow melakukan tinjauan kebijakan setelah krisis Ukraina tahun 2014 dan menemukan bahwa industri pertahanan Tiongkok lebih maju dari yang diperkirakan sebelumnya. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa manfaat yang dapat diperoleh Tiongkok dari teknologi *reverse-engineered* Rusia kurang dari perkiraan sebelumnya, mengurangi risiko bahwa sistem *reverse-engineered* Tiongkok akan bersaing dengan sistem Rusia di pasar senjata global.

Selain itu, Gabuev mencatat bahwa Moskow menemukan banyak sistem yang diduga dicuri oleh Beijing telah benar-benar diperoleh melalui kontrak yang sah dengan perusahaan pertahanan Tiongkok dan peraturan lemah transfer teknologi Rusia ke Tiongkok. Faktor lain yang mungkin menyebabkan pergeseran Moskow untuk menjual senjata ke Beijing adalah ekonomi Rusia yang lemah dan isolasi yang semakin dalam dari Barat (Gabuev, 2016). Isolasi yang kuat dari Barat benar-benar mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Rusia. Ekonomi Rusia memang mengalami penurunan yang signifikan sejak 2014-2016. Maka, dalam konteks ini, dapat dipahami bahwa upaya memperlambat hubungan Rusia dan Tiongkok dijalankan semakin kuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Rusia melalui perdagangan internasional.

Volume perdagangan bilateral yang berjumlah \$15,8 miliar pada tahun 2003 mencapai \$95,3 miliar pada tahun 2014, memberi harapan Rusia bahwa itu bisa segera mencapai \$100 miliar (Trade Statistic, 2016). Sementara Tiongkok pada saat itu menjadi mitra dagang pertama Rusia, volume perdagangan Tiongkok dengan Uni Eropa telah mencapai lebih banyak \$500 miliar pada tahun 2014, menandakan seberapa besar perbedaan di masing-masing kapasitas pasar Rusia dan Pasar uni Eropa (Perdagangan UE, 2009;

Eurostat, 2015). Pada tahun 2014, EU (28 negara) masih terhitung 45,8% dari total ekspor Rusia dan 42,6% dari total impor. Tiongkok telah menjadi mitra dagang pertama Rusia, dengan nilai ekspor dan impor masing-masing sebesar 6,8% dan 16,9% (WTO, 2016; Malle, 2017).

Meski mengalami tren yang mengembirakan setelah 2009, volume perdagangan kedua negara mengalami penurunan tajam setelah tahun 2014. Perputaran perdagangan antara Tiongkok dan Rusia turun 27,8% menjadi \$ 64,2 miliar di tahun 2015. Nilai total ekspor Rusia ke Tiongkok turun pada tahun 2015 sebesar 19,1% menjadi \$31,4 miliar, menurut Huang Songping, juru bicara departemen bea cukai Tiongkok (Malle, 2017). Perdagangan luar negeri Rusia turun tidak hanya dengan Tiongkok, tapi secara umum, karena kombinasi antara turunnya permintaan dan harga untuk hidrokarbon (Lukin, 2016). Meskipun demikian, Rusia telah berhasil secara efektif mengarahkan ekonominya ke arah timur dan meningkatkan penetrasi pasar Tiongkok.

Konsekuensi: Peningkatan Hubungan Militer Rusia-Tiongkok

Upaya Uni Eropa untuk menekan Rusia juga membuat negara ini mengambil langkah mencari aliansi baru dan membangun kembali hubungan diplomatiknya dengan negara-negara di timur, terutama Tiongkok. Rusia maupun Tiongkok sebenarnya memiliki kedekatan secara geografis dengan Asia Tengah. Keduanya memiliki kekhawatiran yang sama akan pengaruh Amerika Serikat di kawasan tersebut. Hubungan geopolitik dengan Tiongkok yang semakin dekat, serta kekhawatiran yang sama terhadap pengaruh AS di Asia Tengah, membuat Putin tak ragu merangkul Tiongkok sebagai negara mitra strategisnya.

Untuk membesarkan kembali kekuatan militer dan mengembalikan eksistensi keadidayaannya di mata internasional, Rusia memerlukan negara

kuat yang mampu menunjang Rusia mencapai tujuan nasionalnya tersebut. Dalam hal ini, dengan kekuatan militer secara kualitas dan kuantitas persenjataan maupun pasukan militer yang sangat besar yang dimiliki, Tiongkok menjadi daya tarik bagi Putin untuk melakukan kerja sama militer dengan negara tersebut.

Tawaran kerja sama yang diajukan Putin disambut baik oleh Tiongkok. Pada tahun 2012-2013 Rusia kemudian mengintensifkan upayanya untuk memperkuat Angkatan Bersenjata di Distrik Militer Timur. Hal tersebut berhasil meningkatkan hubungan dengan Tiongkok. Evolusi hubungan militer Tiongkok-Rusia menuju tingkat kerja sama dan koordinasi yang lebih tinggi terbukti dalam tiga bidang utama keterlibatan pertahanan bilateral: (1) latihan militer, (2) operasi teknis militer, dan (3) kontak militer tingkat tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara di ketiga bidang tersebut semakin meningkat dan erat. Latihan bilateral dan multilateral reguler meningkat dalam kompleksitas, terutama dalam manuver, koordinasi, dan sistem senjata yang digunakan, terutama memperluas pertahanan rudal.

Demikian pula, kontak militer-ke-militer bilateral semakin intensif dengan pertemuan pejabat pertahanan di tingkat yang lebih tinggi, serta memberikan kesempatan para pejabat militer untuk memfasilitasi paket persensenjataan, mempersiapkan latihan militer, serta mendiskusikan berbagai masalah keamanan regional dan global (Meick, 2017). Hubungan militer antara kedua negara memiliki tujuh kontak tingkat tinggi pada tahun 2016, sesuai dengan tahun sebelumnya dan menandai pertemuan paling banyak tersebut sejak tahun 2008. Meskipun hanya ada dua pertemuan di tingkat atas, empat dari pertemuan tersebut melibatkan para perwira tingkat lanjut, yang mengindikasikan peningkatan pertukaran militer yang lebih tinggi. Hal ini dapat dipahami bahwa merencanakan

latihan yang lebih besar dan lebih rumit antara Tiongkok dan Rusia serta meningkatkan kerja sama teknik militer memerlukan kepemimpinan, perencanaan, dan koordinasi tingkat atas yang lebih tinggi.

Di sela-sela KTT G-20 yang diselenggarakan di Hangzhou, Tiongkok, pada bulan September 2016, Presiden Xi mengatakan kepada Presiden Putin bahwa pertukaran militer seharusnya diperkuat, dan keduanya telah saling sepakat untuk meningkatkan pertemuan tingkat tinggi dalam beberapa tahun terakhir karena hubungan pertahanan semakin erat. Dengan para pemimpin masing-masing negara mendukung peningkatan kontak militer dan hubungan pertahanan yang lebih erat secara lebih luas, Tentara Pembebasan Rakyat (militer Tiongkok) dan Angkatan Bersenjata Rusia diharapkan dapat mengalami kontak tingkat tinggi yang lebih sering di tahun-tahun mendatang.

Rusia menyakini akan kemampuan Tiongkok dalam mengimbangi kekuatan AS di Asia Tengah karena Rusia memandang bahwa kekuatan Tiongkok terus mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam pandangan Rusia, Tiongkok adalah negara yang semakin kuat dalam ekonomi, politik, dan militer. Jika Tiongkok terus mengalami perkembangan seperti itu maka kerja sama antara Rusia dan Tiongkok diharapkan juga akan terus mengalami peningkatan dan membuat kekuatan Amerika Serikat di Asia Tengah akan terus menurun secara relatif. Dengan demikian, kekhawatiran Rusia terhadap blok Barat akan semakin berkurang.

Bangkitnya kembali kekuatan militer Rusia sejalan dengan terus membesarnya kekuatan militer Tiongkok, membuat kedua negara ini semakin memperkokoh eksistensi mereka di kancah politik dunia. Ancaman kolektif yang dihadapi mendorong kedua *great power* ini untuk memperkuat kerja sama militer dengan membentuk aliansi strategis di bidang pertahanan. Hubungan ekonomi-militer yang paling

signifikan antara kedua negara adalah perdagangan senjata.

KESIMPULAN

Artikel ini telah mengupas dampak internasional dari sanksi Barat terhadap Rusia pasca-aneksasi Krimea. Barat berupaya menekan Rusia dengan menerapkan sanksi terhadap Rusia. Sanksi tersebut berupa larangan penyediaan teknologi untuk eksplorasi minyak dan gas, larangan pemberian kredit kepada perusahaan minyak Rusia dan bank negara, serta pembatasan perjalanan pada warga Rusia berpengaruh yang dekat dengan

Presiden Putin dan terlibat dalam aneksasi Krimea. Benar bahwa sanksi tersebut sempat memukul perekonomian Rusia, namun sanksi Barat ternyata memiliki konsekuensi strategis bagi hubungan internasional Rusia, yaitu penguatan hubungan ekonomi dan militer dengan Republik Rakyat Tiongkok. Menguatnya hubungan antara kedua *great power tersebut* berdampak penting bagi peta politik dunia kontemporer yang multipolar ini. Mastanduno (2019) mencatat bahwa hubungan kedua *great power* ini merupakan kekuatan yang bisa menentang hegemoni Amerika di era dewasa ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal

- Bagheri, S and Akbarpour, H. R (2017). Reinvestigation of the West's Sanctions against Russia in the Crisis of Ukraine and Russia's Reaction. *Procedia Economics and Finance*, 36(16), 89–95.
- Bimbetova, B., Tyurina, Y., Troyanskaya, M., Ermakova, E., Orynassarova, A., Skakova, A., Koptayeva, G. & Agabekova, G. (2019). The Impact of International Sanctions on National Economic Regime of Target States. *Academy of Strategic Management Journal*, 18(4), 1–9.
- Boucher, D (2020). Western Economic Sanctions against Russia: An Opportunity for Closer Eurasian Integration? *Orientalo*, 10(19), 1-27. DOI: <https://doi.org/10.25009/orientando.v0i19.2642>.
- Charap, S., Drennan, J. & Noël, P. (2017). Russia and China: A New Model of Great-Power Relations. *Survival*, 59(1), 25-42. DOI: <http://dx.doi.org/10.1080/00396338.2017.1282670>.
- Creswell, J. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches* (4th Eds). London: SAGE.
- Galtung, J. (1967). On the Effects of International Economic Sanctions, With Examples from the Case of Rhodesia. *World Politics*, 19(3), 378 – 416.
- Hufbauer, G. C., Schott, J. J., & Elliott, K. A. (1990). *Economic Sanctions Reconsidered: History and Current Policy, Volume 1*. Washington, D.C.: Institute for International Economics.
- Lektzian, D. & Souva, M. (2007). An Institutional Theory of Sanctions Onset and Success. *Journal of Conflict Resolution*, 51(6), 848-871.
- Malle, S. (2017). Russia and Tiongkok in the 21st century. Moving towards cooperative behaviour. *Journal of Eurasian Studies*, 8(2), 136–150.
- Mastanduno, M. (2019). Partner Politics: Russia, Tiongkok, and the Challenge of Extending US Hegemony after the Cold War. *Security Studies*, 28(3), 1-26.
- Mankoff, J. (2014). Russia's Latest Land Grab: How Putin Won Crimea and Lost Ukraine. *Foreign Affairs*, 93(3), 60-68.
- Manurung, H. (2017). Russia Domination Policy: Implementation of Military Operation in Ukraine (2014–2015). *Insignia Journal of International Relations*, 4(2), 21-34.

Muhammad, A. (2016). *Kebangkitan Kembali Great Power: Politik Luar Negeri Tiongkok di bawah Presiden Vladimir Putin*. Yogyakarta: MIHI Press.

Muhammad, A. (2015). Selamat Datang Perang Dingin! Kepentingan Rusia Di Krimea Dan Ukraina Timur Dan Ketegangan Hubungan Dengan Barat. *Insignia Journal of International Relations*, 2(2), 1-11.

Artikel Daring

Curran, J. R. (2017). "Russian-Ukrainian Conflict Explained". *Huffington Post*. Diakses dari [Error! Hyperlink reference not valid.](#)

Gabuev, A (2016, 23 Juni). "Friends with Benefits? Russian-Chinese Relations after the Ukraine Crisis," *Carnegie Moscow Center*. Diakses dari <https://carnegiemoscow.org/2016/06/29/friends-with-benefits-russian-chinese-relations-after-ukraine-crisis-pub-63953>.

Global Times. (2021). "Russians increase affinity to China; multipolarity enhanced." Diakses dari <https://www.globaltimes.cn/page/202103/1218203.shtml>.

Klein, M & Westphal, K. (2016). "Rusia: Turn to China?" *Stiftung Wissenschaft und Politik German Institute for International and Security Affairs*. Diakses dari <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-460765>.

Meick, E. (2017). "Tiongkok-Russia Military-to-Military Relations: Moving Toward a Higher Level of Cooperation." *US-Tiongkok Economic and Security Review Comission*. Diakses dari <https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/Tiongkok-Russia%20Mil-Mil%20Relations%20Moving%20Toward%20Higher%20Level%20of%20Cooperation.pdf>.

Ovcharenko, R. K., et. al (2019). "Sanctions on Russia: effectiveness and impacts on the national security of Russia." *Amazonia Investiga*, 565-573.

Diakses dari https://redib.org/Record/oai_articulo30444563-sanctions-russia-effectiveness-impacts-national-security-russia.

Oxenstierna, S (2019). "The Western sanctions against Russia. How do they work?" in Steven Rosefielde (ed.), *Putin's Russia: Economic, Political and Military Foundations*, World Scientific. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/333749037_The_Western_sanctions_against_Russia_How_do_they_work.

Parstoday.com. (2016). "Perpanjangan Sanksi Eropa terhadap Rusia." Diakses dari https://parstoday.com/id/news/world-i13618-perpanjangan_sanksi_eropa_terhadap_rusia.

The Economist. (2017), "America's new economic sanctions may hurt Russia's recovery" diakses dari <https://www.economist.com/europe/2017/08/05/americas-new-economic-sanctions-may-hurt-russias-recovery>.

Viva. (2014). "Dampak Krisis Ukraina, China dan Rusia Kian Mesra." Diakses dari <https://www.viva.co.id/berita/dunia/537816-dampak-krisis-ukraina-china-dan-rusia-kian-mesra>.

Yegorov, O. (2017). "Perang Ukraina: Apa dan Kenapa?" *RTBH*. Diakses dari https://id.rbth.com/politics/2017/02/22/apa-yang-sebenarnya-terjadi-di-ukraina_zyx707361.

Yueh, L. (2015). "The Impact of Economic Sanctions on Russia." *BBC*. Diakses dari <http://www.bbc.com/news/business-26680182>.